KONSEP HAM DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MODERN (Telaah atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im)

*Khusnul Khotimah**

Abstract

Abdullahi Ahmed An-Na'im tried to confront the secularism and fundamentalism. He used naskh to pay more attention on humanism, equity and freedom. Eventhough there are some weakness, he has made a great achievement in Islamic modernism to answer humans problems.

Kata Kunci: *HAM, hukum Islam, naskh*

A. Pendahuluan

Dominasi Barat terhadap dunia Islam menyebabkan krisis pemikiran dan konsep, baik menyangkut politik maupun hukum Islam, dan pada akhirnya menimbulkan pertentangan keras di dunia Islam antara aliran sekuler dan fundamentalis (konservatif). Aliran sekuler menghendaki Islam dan negara harus dipisahkan dan hukum Islam (syari'ah) harus diganti dengan hukum Barat. Sedangkan aliran fundamentalis ingin menerapkan Islam (syari'ah) secara utuh tanpa adanya pembatasan sedikitpun.¹

* Penulis adalah dosen tetap Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto.

¹ Tore Lindolm dan Karl Vogt (ed), *Dekonstruksi Syari'ah II*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1996), hal. 155. Judul asli buku ini adalah *Islamic Law Reform and Human Rights*.

Berangkat dari kenyataan di atas, Abdullahi Ahmed An-Na'im sebagai salah seorang tokoh pembaharu di dunia Islam berusaha mencari metodologi baru tentang pembaharuan hukum Islam yang diharapkan mampu menjawab dua aliran ekstrim tersebut. Hal ini dilakukan karena jawaban aliran fundamentalis yang ingin menerapkan hukum Islam secara utuh tidaklah menyelesaikan masalah, bahkan telah mengancam eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi internasional. Faktanya dapat dilihat dari pengalaman praktek penerapan hukum Islam di Sudan, di mana dalam hukum tersebut terdapat diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim sangat jelas.² Sementara itu jawaban aliran sekularis telah membawa kepada keadaan yang simplistik dengan menghindari dari agama Islam dalam memecahkan masalah di bidang sosial, politik, ekonomi dan keduniaan lainnya.

B. Riwayat Hidup Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Gurunya

Abdullahi Ahmed An-Na'im merupakan tokoh yang lahir di Barat dan menjadi seorang pembaharu yang berwibawa di Sudan. Sudan adalah salah satu dari negara Islam yang terletak di benua Afrika, suatu negara yang tidak sepi dari pergolakan. Pergolakan di Sudan secara garis besar dibagi dua periode. *Pertama*, masa kolonialis (Inggris), adalah perseteruan antara ideologi Islam (penerapan hukum Islam secara kaffah) dengan ideologi sekular (yang dimotori Inggris). *Kedua*, masa pasca kolonial, yaitu sejak Sudan lepas dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1956. Selain dua arus kekuatan tersebut, juga muncul kekuatan moderat yang diwakili oleh Taha,³ yang ingin menjadi penyeimbang antara kekuatan sekular dengan ideologi fundamentalis yang dipimpin oleh Hasan Turabi.⁴

² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak-hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahamad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1997), hal. 16.

³ Aziz Al-Azmeh (ed), *Islamic Law: Social and Historical Contexts* (New York: Routledge, 1989), hal. 690.

⁴ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), IV: 240-1.

Penyeimbang tersebut disebut dengan ideologi Islam modern yang menjadi pijakan An-Naim dalam melakukan pembaharuan hukum Islam.

An-Na'im adalah seorang professor Olof Palme dari University of Upshala (1991-1992) dan sejak tahun 1993 menjadi direktur eksekutif African Watch, Washington DC.⁵ Sedangkan pendidikan An-Na'im dimulai dari sarjana bidang hukum di Universitas Khartoum, kemudian sarjana S2 di Cambridge Inggris dan Ph.Dnya diraih di Universitas Endinburgh.⁶ Karir An-Na'im semakin meningkat dengan diangkatnya menjadi penasehat Rockefeller di bidang HAM pada Universitas Columbia dan menjadi dosen di almamaternya, Universitas Khortum, di samping menjadi dosen tamu di bidang hukum UCLA.⁷

Menurut Ann Elizabeth Mayer, An-Na'im adalah seorang ahli di bidang hukum Islam dan hukum internasional. Pesatnya karir An-Na'im merupakan prestasi dari keahlian di bidang tersebut telah membuat ia mampu melahirkan pembaharuan hukum Islam yang dilandasi dua spesifikasi keilmuan di bidang hukum (modern) sekuler (tradisi Eropa abad ke-17 M) dan hukum Islam yang secara garis besar dihasilkan mulai dari masa Nabi hingga Umaiyah dan Abbasiyah abad 6-7 M.⁸ Sesuai dengan penuturannya sendiri, ia melakukan sebagian riset buku "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law" pada saat menjadi anggota Program Sejarah, Budaya dan Masyarakat pada Woodrow Wilson Internasional Center for Sholars, Washington, D.C.⁹

Perhatian An-Na'im terhadap Islam yang telah melahirkan karya monumental tersebut merupakan prestasi yang sangat besar. Namun demikian ditinjau dari sisi metodologis, buku ini lahir dari

⁵ Lindolm dan Vogt (eds.), *Dekonstruksi Syari'ah II*, hal. 311.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahmoud Mohamed Taha, *The second Message of Islam*, terj. Abdullahi Ahmed An-Na'im (New York Syracuse University Press, 1987), hal. V.

⁸ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Right: Tradition and Politics* (Colorado: Westview Press, 1995).

⁹ An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hal. xxiii.

pengaruh gurunya, Mahmud Muhammed Taha, yang telah mendahuluinya dalam melakukan pembaruan hukum Islam, khususnya hukum Islam yang berlaku di Sudan. Taha adalah seorang radikal yang telah menawarkan metodologi baru dalam memahami Islam, yaitu *naskh* sebagai cara memahami teks al-Qur'an. Ia memaknai *naskh* dengan pengertian penundaan pemberlakuan teks suci (penghapusan sementara ayat-ayat *makīyah* oleh ayat-ayat *madaniyyah*) hingga relevan dengan situasi dan kondisi di masa kini dan mendatang.¹⁰

Pemahaman ini berbeda dengan pendapat aliran fundamentalis (klasik) yang melihat *naskh* sebagai penghapusan terhadap teks al-Qur'an yang turun pada periode Mekkah oleh teks yang turun belakangan, teks al-Qur'an yang turun pada periode Madinah.¹¹ Dengan demikian *naskh* model Taha adalah pembalikan konsep *muhkamāt* dan *mutashābihāt* dari ulama klasik. Maksudnya, teks al-Qur'an yang *muhkamāt* pada abad ke tujuh (teks al-Qur'an periode Madinah) sekarang dinaskh, dan teks al-Qur'an periode Mekkah yang dinilai *mutashābihāt* pada abad ke tujuh pada saat sekarang menjadi teks inti.

Taha menyusun pemahaman baru ini pada dasarnya untuk merespon tantangan penguasa kolonial Inggris yang berpaham sekularis.¹² Ia tidak setuju terhadap keputusan yang represif seperti pemaksaan undang-undang hukum Pidana Sudan Pasal 284 A yang melarang pemotongan organ genital. Taha dengan partai Republiknya menolak keputusan tersebut karena dinilai bertentangan dengan budaya Sudan. Ia menghendaki pemberdayaan perempuan melalui jalur pendidikan untuk memunculkan kesadaran pribadi mereka.¹³

¹⁰ *Ibid.*, hal. 96-135. Menurut Abū Zayd, yang meliris pendapat Al-Zarkashī, nasakh bermakna menunda atau menangguhkan sampai waktu yang tepat untuk membawa kemaslahatan bagi manusia. Pengertian ini diambil dari penafsiran kata *nansa'* dengan menambah *hanzah* di akhir. Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 157.

¹¹ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 339.

¹² Taha, *The Second Message*, hal. 2-3.

¹³ *Ibid.*, hal. 13-14.

Namun demikian perlawanan tersebut mengakibatkan Taha dipenjara selama dua tahun. Meski di penjara, Taha tetap mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan pembaruan Islam hingga ia melahirkan karya monumental, *al-Risālah al-Thānīyah min al-Islām*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh An-Na'im dengan judul *The Second Message of Islam*. Buku ini telah memberi inspirasi kepada An-Na'im dengan metodologi pembaharuan hukum Islam menuju hukum Islam Modern yang sesuai dengan HAM Internasional.

C. Posisi An-Na'im dalam Pemikiran Keislaman

Secara umum paradigma pemikiran keislaman dalam merespon tantangan dunia modern terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, pemikiran hukum Islam yang berwawasan fundamentalis (konservatif). Suatu pemikiran yang menghendaki penerapan hukum Islam (syari'ah historis) secara harfiyah tanpa memilih dan memilah antara yang teks universal dan historis. *Kedua*, pemikiran hukum Islam yang mencoba mereaktualisasi hukum Islam, meskipun hanya sebatas pada nas (al-Qur'an dan al-Hadits) yang dianggap masih *zammī* (teks yang bersifat universal), dan tidak pada teks yang sudah pasti secara teknis-praktis (*qaṭ'i*). *Ketiga*, pemikiran sekular yang memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang tidak relevan dengan keadaan modern. Karenanya, perlu diganti dengan hukum-hukum sekuler sebagaimana diatur dalam hukum (publik) modern yang meliputi; konstitusionalisme, hukum (hubungan) Internasional, hukum pidana, dan hak-hak asasi manusia (HAM).¹⁴

Berangkat dari pemikiran di atas, An-Na'im sebagai seorang tokoh pembaharu hukum Islam menawarkan metodologi alternatif pembaharuan Islam dengan pendekatan evolutif (*naskh*) bagi penerapan ayat-ayat al-Qur'an untuk menerjemahkan hukum Ilahiyah dan kemanusiaan (hukum modern) secara sekaligus. Pendekatan evolutif ini adalah sebagaimana telah dilakukan oleh pendahulunya,

¹⁴ James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machsun Husein (Surabaya: CV. Amrpress, 1991), hal. 91.

Taha. Ia melakukan analisis kontekstual terhadap hakikat dan kondisi pewahyuan serta implikasinya dalam kehidupan modern untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan modern.

D. Mempertemukan Hukum Islam (Syari'ah) dengan Hukum Modern

Dengan melihat kenyataan bahwa penerapan hukum Islam (syari'ah) tidak memadai, bahkan cenderung melanggar hukum modern, melanggar hak-hak asasi manusia, maka An-Na'im berupaya mempertemukan hukum Islam dengan hukum-hukum modern. An-Na'im menilai hukum Islam yang identik dengan absolutismenya¹⁵ dinilai oleh kalangan ilmuwan melanggar ketentuan hak-hak azasi manusia. Sedangkan hukum modern (publik yang sekular) menuntut rasionalitas standar internasional yang digunakan, baik menyangkut konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional dan HAM tidak dapat diterima oleh aliran agamawan (Islam).

Berpijak dari dua pemikiran yang berbeda, An-Na'im berusaha mempertemukan dengan proses akulturasi dengan dua metode: *Pertama*, melakukan kritik atau auto kritik terhadap tradisi keislaman itu sendiri, baik hukum Islam (syari'ah) yang dibangun pada periode Madinah maupun ulama masa pertengahan (Umayyah dan Abbasiyah) yang berpijak pada aturan teknis-praktis dalam al-Qur'an. Sebab menurut an-Na'im hukum Islam tersebut bukanlah aturan sempurna yang baku yang tidak diberlakukan tanpa pembaharuan dan batasan. Karenanya, An-Na'im memandang perlu untuk merekonstruksi dan mendekonstruksi hukum Islam lama (yang sering disebut syari'ah histories oleh An-Na'im) untuk membangun hukum baru, hukum Islam modern. *Kedua*, hukum modern yang dihasilkan oleh para modernis Barat sejak abad 19 merupakan suatu contoh yang maju dan spektakuler karena ia telah membawa wacana dan perubahan pola hidup yang menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan sebagai isu utamanya dan mereka menolak semua bentuk diskriminasi,

¹⁵ An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hal. 77.

eksploitasi dan semua perilaku yang mengancam eksistensi manusia. Suatu bentuk bangunan hukum berdasarkan aturan emas (*resiprositas*), yaitu suatu hukum yang menginginkan adanya perilaku yang memposisikan orang lain sebagaimana yang diinginkannya sendiri.¹⁶

Metodologi yang dibangun dalam melakukan rekonstruksi syari'ah modern yang dilakukan an-Na'im adalah melalui kritik wacana dengan pisau analisis pemetaan John Voll dan memberikan sintesis seperti dipolakan Fazlur Rahman.¹⁷ Menurut analisis Voll, ada tiga tema yang perlu digaris bawahi dalam wacana *tajdid-islāh* yang dipedomani di kalangan pemikir muslim pra-modern yaitu; (1) kehendak untuk kembali kepada (penerapan sempurna) al-Qur'an dan Sunnah, (2) penegasan hak untuk lebih menggunakan ijtihad (pemikiran hukum secara mandiri) dari pada taklid (membatasi diri dan mengikuti tanpa mempertanyakan produksi pemikiran ahli hukum yang sudah mapan), dan (3) penegasan kembali otensitas dan keunikan-keunikan pengalaman al-Qur'an.¹⁸ Kualifikasi pertama menurut Voll digunakan untuk menepis segala sesuatu yang dapat melawan ketaatan dan mengarahkan kekafiran, kemudian kualifikasi kedua (ijtihad) merupakan konsekuensi dari yang pertama. Sedangkan kualifikasi ketiga (penegasan kembali keunikan dan otensitas al-Qur'an) dalam situasi yang berubah adalah upaya sadar untuk melakukan sintesa. Kecenderungan yang terakhir ini yang hendak dikembangkan oleh an-Na'im untuk mengkritik tradisi ulama Fiqh Sudan yang dinilai kurang mampu mengemban pesan "perubahan".

Bagi an-Na'im, berbicara tentang penerapan al-Qur'an dan Sunnah sesungguhnya berbicara tentang interpretasi dan penerapannya melalui perantara manusia, demikian juga tentang interpretasi ijtihad. Sehingga dalam pandangan an-Na'im, tuntutan penerapan al-Qur'an dan sunnah secara sempurna dan upaya-upaya ijtihad bagi

¹⁶ *Ibid.*, hal. 310.

¹⁷ John O. Voll, "Renewal and Reform in Islamic History: *Tajdid and Islāh*," dalam John L. Esposito, (ed.), *Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford university Press, 1983), hal. 32-47. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hal. 214.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 32-47.

solusi atas persoalan, sama artinya dengan memerlukan ketentuan interpretasi yang dapat diterapkan pada sumber-sumber fundamental Islam dalam realitas kehidupan sosial, ekonomi dan politik umat Islam sekarang ini dan akan datang.¹⁹

Demikian juga dalam hal penegasan otensitas al-Qur'an dan pelaksanaan ijtihad dalam kerangka syari'ah yang dibangunnya, an-Na'im meragukan hasil yang diperoleh ahli hukum perintis. Penegasan otensitas al-Qur'an dengan menolak elemen lain (asing; Barat) di samping mensyaratkan interpretasi mana yang murni dan mana asing, ia juga mengandung banyak kelemahan. Sebab al-Qur'an sendiri banyak memuat kontradiksi-kontradiksi, seperti dalam kasus ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyyah. Sementara dalam ijtihad, karena ulama perintis selalu mendasarkan pada naskah teks yang jelas dan pasti, maka ia tidak akan mampu memasuki wilayah hukum-hukum kontemporer (hukum konstitusional, peradilan kriminal, hukum Internasional dan HAM), sebab landasannya amat jelas dan pasti; ayat-ayat *qat'iyyah*. Padahal di samping landasan-landasan pasti, masih ada dimensi *zanni* yang menjadi sumber hukum syari'ah.

Sedang penolakan an-Na'im terhadap pilihan sekularisme sebagai pendekatan amat jelas, bahwa sekularisme bukanlah respon Islami, walau ia lahir dari kebuntuan umat Islam dalam mempertemukan syari'ah dengan berbagai tuntutan dan aspirasi modern, serta tidak berfungsinya syari'ah bila diterapkan sekarang, namun sekularisme bukanlah jawabannya.

E. Pembaharuan Hukum Islam Melalui Pendekatan HAM

Pembaharuan hukum Islam An-Na'im melalui pendekatan HAM dilakukan dengan cara meletakkan teks al-Qur'an periode Mekkah sebagai pijakan dasar untuk membentuk hukum Islam modern yang tidak diskriminatif²⁰ dan melakukan hubungan yang

¹⁹ An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hal. 95-96.

²⁰ Di dalam pemikiran modern hukum Islam tidak membolehkan diskriminasi, baik dari sisi agama maupun dari jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan (muslim dan muslimat). *Ibid.*, hal. 345.

erat antara satu negara dengan negara lain. Sebab teks tersebut adalah yang prinsip dan mampu mempertemukan diri dengan *internasional human right law*. Upaya ini penting untuk mempertemukan nilai-nilai prinsipil Islam (ayat-ayat Mekkah) dengan hukum modern sebagai suatu keniscayaan dalam konteks kekinian. Pendapat ini diperkuat oleh Mayer yang mengatakan bahwa memelihara kedamaian dan kebebasan hidup warga plural perlu dilandaskan pada prinsip universal yang diyakini pasti mampu dan mendukung tegaknya HAM internasional.²¹

Penerapan hukum Islam pada idealnya harus menghindari perlakuan diskriminatif terhadap sesama warga negara maupun antar warga negara, sehingga masing-masing dapat menikmati kebebasan berpendapat, beragama,²² beribadah dan berkelompok. Oleh karenanya, melihat hukum modern yang prospektif bagi pluralisme hidup manusia, maka hukum Islam yang dilahirkan dalam suatu komunitas Arab di Madinah ataupun yang diformulasikan oleh ulama salaf haruslah direkonstruksi dan didekonstruksi supaya hukum Islam itu dapat berakar dari nilai ajaran Islam yang paling prinsipil, *rahmatan li al-'alamin* dapat diterapkan dalam kehidupan nyata saat ini. Dengan cara ini orang akan menerima perlakuan sama tanpa ada diskriminasi jenis kelamin dan agama. Jadi dalam suatu negara (Islam) partisipasi politik, kedaulatan, kewarganegaraan, haruslah mencerminkan persamaan sebagaimana aturan hukum Islam modern yang dicita-citakan An-Na'im. Elemen hukum Islam yang diskriminatif terhadap non-Muslim, terhadap perempuan, dan legalisasi perbudakan haruslah diganti dengan hukum Islam modern yang bersumber pada ayat-ayat *Makiyyah*. Begitu juga hukuman yang kejam seperti *hadd al-sariqah* di dalam hukum Islam, haruslah ditelaah ulang dan dirumuskan menjadi hukum yang mendidik bagi masyarakat, bukan

²¹ Mayer, *Islam and Human Right*, hal. 141-2. Lihat juga, *Kumpulan Perangkat HAM Internasional*, Panduan Pelatihan Monitoring, Investigasi dan Advokasi Hak-hak Asasi Manusia, Pelaksana INSIS-CHRF dan Jaringan Adukatork HAM Kalimantan.

²² Hukuman bagi *mu'taddin* yang pernah dijatuhkan oleh Abu Bakar lebih karena pemberontakan bukan sekedar keluar dan pindah agama dari Islam. An-Na'im, *Dekonstruksi Syariat*, hal. 153.

malah membuat kejahatan kemanusiaan dengan memotong tangan yang menurut standar hukum modern adalah merupakan hukuman kejam, barbarisme.

Pendekatan melalui analisis kontekstual terhadap ayat-ayat *mudaniyyah* dan pembacaan ayat-ayat *makkiyyah* secara seksama sebagai prinsip hukum Islam modern akan membawa kesimpulan bahwa muslim dan non-muslim mempunyai kedudukan dan peran yang sama di depan hukum.²³ Menurut An-Na'im pendekatan ini digolongkan sebagai pendekatan yang Islami, sebab pendekatan ini dapat dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan dan di sisi hukum modern.

Pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh an_Na'im pada penerapannya dipergunakan untuk menganalisis suatu masalah kemanusiaan yang perlu diperbaharui antara lain: *Pertama*, hukum Islam yang mengatur hubungan muslim dan non-muslim dan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya (i) seorang muslim boleh mengawini perempuan non-muslim, tetapi tidak sebaliknya; (ii) perbedaan agama menghalangi pewarisan harta; (iii) laki-laki boleh mengawini empat perempuan; (iv) laki-laki boleh menceraikan perempuan (istrinya) dengan bebas, sedangkan istri harus mendapat izin hakim; (v) laki-laki muslim mendapat warisan lebih banyak dari perempuan; (vi) di suatu negara Islam, muslim mendapat kewarganegaraan penuh, sedangkan non-muslim menjadi warga negara kelas dua; (vii) denda pidana muslim dan non-muslim tidak sama. *Kedua*, diskriminasi hukum Islam lainnya adalah legalisasi perbudakan. Penghargaan pada manusia yang berstatus budak setengah manusia, boleh dijual dan diperlakukan sesuai dengan kehendak tuannya.

²³ *Ibid.*, hal. 190. Paradigma pemikiran semacam ini juga sesuai dengan pendapat Muhammad Rashid Ridā yang berpendapat bahwa:

Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan zaman, tempat dan situasi. Kalau satu hukum diundangkan pada saat dibutuhkan hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka suatu tindakan bijaksana menghapus dan menggantikannya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai dengan waktu belakangan (atau dengan kata lain harus ada pembatasan yang jelas terhadap hukum Islam dalam penerapannya).

Lihat, Muhammad Rashid Ridā, *Tafsir al-Manār* (Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyyah li al-Kitāb, 1973), Juz.I, hal. 414.

Demikian juga konsep tentang negara dan pelaksanaan pemerintahan Islam perlu dilakukan pembaruan dengan memperjelas mekanisme pilihan, pertanggungjawaban, pemberhentian, posisi penguasa dan posisi rakyat serta aturan kebebasan beragama, berpendapat, berkelompok dan mengekspresikan semua keinginannya adalah suatu tuntutan mendesak di dunia modern mengingat hukum Islam tidak merincinya.²⁴ Jadi penegasan model negara dan pelaksanaan pemerintahan Islam secara eksplisit merupakan agenda mendesak untuk mendukung tegaknya pilar-pilar HAM Islam. Hal ini penting supaya peristiwa tragis yang sering menimpa umat Islam dengan tuduhan makar tidak terjadi lagi, tuduhan murtad seperti peristiwa yang menimpa Ibnu Taimiyyah, al-Hallaj dan Mohmoud Taha dengan hukum pidana mati tidak terjadi lagi, dan pada akhirnya pembaharuan hukum Islam di bidang HAM merupakan upaya untuk menegakkan HAM itu sendiri, suatu konsep hukum yang dapat diterima oleh semua komponen masyarakat dengan sudut pandangnya sendiri. Artinya, umat Islam menerima hukum dengan disadari kerelaan dan umat non-muslim menerimanya dengan kerelaan tanpa ada pemaksaan di antara keduanya.

Pada tataran praktis, An-Na'im memberikan dua pendekatan dalam penerapan HAM. *Pertama*, mengambil konsep-konsep universal yang diratifikasi oleh pemerintah-pemerintah yang beraneka ragam. Pendekatan ini sama dengan ketika mengambil prinsip agama (teks al-Qur'an periode Makkah). *Kedua*, menemukan universalisme norma-norma dan nilai-nilai yang diterima secara global dari sifat dan martabat manusia.

Sebagai salah satu contoh adalah penerapan prinsip *qawwām* (perwalian) dalam surat an-Nisa (4): 34 yang dalam interpretasi hukumnya selalu mengandalkan ayat-ayat madaniyah dan sama sekali lepas dari konsep makiyyah yang universal, di mana dijadikannya *qawwām* laki-laki atas perempuan lebih karena unsur ketergantungannya atas laki-laki, baik dalam bidang politik, maupun sosial budaya,

²⁴ *Ibid.*, hal. 153-5.

sehingga menurut syari'at lama tepat sekiranya laki-laki mendapatkan kewenangan untuk menjadi wali (pemimpin) bagi perempuan. Hanya saja persoalannya kemudian adalah, bagaimana jika sekarang tidak ada lagi ketergantungan yang dimaksud? Dari kasus inilah. Maka dengan melakukan penerapan prinsip evolusionisme-interpretatif yang tentu saja mengembalikannya pada pesan-pesan universal yang terkandung dalam ayat-ayat makiyyah, maka ketika dalam kenyataannya tidak lagi ada ketergantungan yang berarti, misalnya orientasi hukumnya pun mesti dirubah. Dengan menggunakan prinsip ini, maka selayaknya kita mengatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sekarang memiliki kebebasan dan tanggungjawab dan kemampuan yang sama di depan hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat.²⁵

F. Beberapa Catatan Kritis Pemikiran Pembaharuan Hukum Isalm An-Na'im

Penulis melihat pembaharuan hukum Islam (syari'ah) menuju hukum Islam modern merupakan suatu model pembaharuan untuk memberikan pemahaman baru dan pendekatan baru dalam memahami Islam, yaitu dengan pendekatan evolutif terhadap teks-teks al-Qur'an dan sekaligus ia meramunya dengan pemikiran dan prinsip-prinsip hukum modern. Sehingga ia menghasilkan pemikiran hukum Islam modern yang mampu menjembatani antara sekularisme dan fundamentalisme. Namun demikian pembaharuan An-Na'im tidak sepi dari kelemahan baik secara metodologis maupun materi pembahasannya.

Dari sisi metodologi, ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain: *Pertama*, Dalam memahami teks ia telah melakukan

²⁵ *Ibid.*, hal. 344-45. Lihat juga pendapat Asghar Ali Engineer yang mengatakan bahwa ketika melihat surat tersebut tidak boleh lepas dari konteks social pada waktu itu dimana kesadaran social perempuan saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestic dianggap sebagai pekerjaan perempuan dan karena laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hal. 61.

kesalahan besar dengan mengeneralisir terhadap teks al-Qur'an periode Makkah (ayat-ayat Makiyyah) sebagai teks yang fundamental mengajarkan sikap egaliter dan kebebasan serta toleransi. Padahal teks al-Qur'an periode Makkah ternyata ada juga yang menyerukan sikap tidak toleransi.

Kedua, Nabi tidak pernah membagi teks dengan dua klasifikasi, yaitu teks al-Qur'an periode Makkah adalah teks yang prinsip (*qat'i*) dan teks al-Qur'an periode Madinah adalah interpretasi (*zamm*). Al-Qur'an turun mempunyai kondisi latar belakang yang berbeda-beda sehingga surat dan ayatnya pun masing-masing memiliki keistimewaan makna yang berbeda.

Ketiga, An-Na'im mendekati Islam dengan terlalu mengunggulkan hukum modern sehingga proses pembaruan hukum Islam modern terkesan berat sebelah. Ia kurang memberikan apresiasi yang besar terhadap Islam, sehingga ia mudah mengatakan bahwa teks al-Qur'an periode Madinah tidak relevan dan kalau diterapkan melanggar HAM. Padahal tidak semua ayat-ayat Madaniyah bersifat partikular spesifik.

Selanjutnya hukum modern yang menjadi tumpuan pembaruan hukum Islam An-Na'im juga mempunyai titik kelemahan tersendiri, yaitu: *Pertama*, hukum itu merupakan dominasi Barat yang cenderung individualistik sedangkan Islam cenderung komunal. *Kedua*, hukumnya masih umum yang hanya menawarkan standar, dan standar itu lebih cenderung mengarah kepada kepentingan Barat, baik dari sisi sosial, politik, ekonomi dan agama.

Sedang dari sisi materi pembahasan yang dihasilkan An-Na'im, masih menimbulkan pertanyaan. Apakah kita harus mengikuti Barat untuk menjadikan hukum Islam modern ataukah bahwa pembaharuan hukum Islam modern yang dihasilkan An-Na'im hanyalah bentuk keterpaksaan karena dunia Islam lemah, sehingga ia harus mengikuti Barat karena faktor ekonomi dan politik yang menimpa Sudan waktu itu. Terlepas dari terpaksa atau tidak, yang jelas pembahasan materi dalam bukunya masih belum menemukan

penjelasan yang rinci terutama pada ayat-ayat *makkiyyah* yang menjadi sumber hukum Islam modern. Sehingga penerapannya menjadi kabur karena pijakan dasar pembaharuannya adalah tidak jelas. Demikian juga dalam pendekatannya masih perlu dipertanyakan ulang, sebab model keputusan perumusan dan pelaksanaannya adalah keputusan semua pihak (demokrasi yang sudah jelas merupakan hasil dari pemikiran Barat). Padahal kesepakatan mayoritas itu tidak selamanya benar dan membawa *muslahah*.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa secara ontologis maupun epistemologis antara HAM dan agama berbeda. Agama berasal dari yang transenden, abadi, rohani, dan hukum jiwa serta komunalistik, sedangkan HAM berasal dari kesepakatan manusia, naturalistik, humanistik dan individualistik. Namun perbedaan tersebut masih menyisakan persamaan pada sisi aksiologis bahwa agama dan HAM dapat bertemu karena ia mempunyai tujuan yang sama, memelihara hak hidup dan kebebasan.

G. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat kita katakan bahwa gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang transformatif-kontekstual dalam konteks kekinian walau bagaimanapun adalah mutlak diperlukan agar syari'ah tetap eksis dan *survive*. Dalam hal ini An-Na'im dengan berbagai ide dan kritisismenya telah menunjukkan bahwa sejatinya syari'ah itu benar-benar *rahmatan lil'ālamīn*. Meskipun pembaharuannya masih menyimpan kelemahan, baik dari segi metodologi maupun dari segi materinya. Kekeliruan dalam melakukan pilihan antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, idealisme dan realisme serta stabilitas dan perubahan yang selama ini menjadikan syari'ah tampak tradisional harus disadari. Hanya saja dalam kondisi sekarang umat Islam semestinya sadar akan historisitas syari'ah, sebab dengan kesadaran itu mereka akan tergerak untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam sosial kemasyarakatan. Dengan demikian operasionalisasi syari'ah bukan hanya berorientasi pada tradisi Islam yang tersembunyi, tetapi bagaimana sosialisasi syari'ah dapat terlaksana

secara proporsional, agar nilai-nilai yang relevan antara ruh syari'ah dengan kondisi masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Tekstualitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Al-Azmeh, Aziz (ed.). *Islamic Law: Social and Historical Contexts*. New York: Routledge, 1989.
- Anderson, James Norman Dalrymple. *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machsun Husein. Surabaya: CV. Amrpress, 1991.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Esposito, Jhon L. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.
- (ed.). *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford university Press, 1983.
- Lindholm, Tore dan Karl Vogt (ed). *Dekonstruksi Syari'ah II*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Right: Tradition and Politics*. Colorado: Westview Press, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ridā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyyah li al-Kitāb, 1973.

Taha, Mahmoud Mohamed Taha. *The Second Message of Islam*, terj. Abdullahi Ahmed An-Na'im. New York: Syracuse University Press, 1987.

Kumpulan Perangkat HAM Internasional, Panduan Pelatihan Monitoring, Investigasi dan Advokasi Hak-hak Asasi Manusia, Pelaksana INSIS-CHRF dan Jaringan Adukator HAM Kalimantan.